



Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Luthfi Azhari^{1*}, Tumija², Restu Widyo Sasongko³

¹Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

²Ilmu Administrasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

³Ilmu Politik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: luthfiazhari.ipdn@gmail.com¹, tumija@ipdn.ac.id², restu_widyo@ipdn.ac.id³

Alamat: Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

*Korespondensi penulis: luthfiazhari.ipdn@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of the local government administrative system in improving the management performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The method used is a literature review by analyzing various previous studies, official reports, and policy documents related to APBD management at the regional level. The results show that a well-structured administrative system can accelerate the planning, implementation, and reporting processes of the APBD, although challenges remain in inter-unit coordination and the utilization of information technology. To enhance effectiveness, it is recommended to strengthen human resource capacity, update financial information systems, and reinforce internal oversight. These findings contribute to efforts to achieve more accountable, efficient, and transparent regional financial governance.*

Keywords: *Administrative System, APBD, Effectiveness, Local Government, Management Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis berbagai studi terdahulu, laporan resmi, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan APBD di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi yang terstruktur mampu mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD, meskipun masih terdapat kendala pada koordinasi antarunit kerja dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran sistem informasi keuangan, serta penguatan pengawasan internal. Temuan ini memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan transparan.

Kata Kunci: APBD, Efektivitas, Kinerja Pengelolaan, Pemerintahan Daerah, Sistem Administrasi.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam efektivitas pengelolaan APBD. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah belum sepenuhnya mematuhi standar akuntansi pemerintah, dengan temuan signifikan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa realisasi APBD di beberapa daerah masih rendah. Pada triwulan pertama tahun 2023, target realisasi sebesar 20% belum tercapai di sejumlah wilayah, yang berdampak pada penanganan inflasi dan percepatan pembangunan. Fenomena ini menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Studi oleh Siregar dan Harahap (2022) juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi faktor penghambat dalam administrasi keuangan daerah (Siregar & Harahap, 2022). Dalam konteks ini, **teori administrasi publik** relevan untuk menjelaskan pentingnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan keuangan publik (Rosenbloom, 2021). Selain itu, **teori efektivitas organisasi** dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem administrasi yang diterapkan mampu mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan APBD (Robbins, 2021).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan APBD. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menganalisis peran, kendala, dan potensi perbaikan sistem administrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah dalam mendukung kinerja pengelolaan APBD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem administrasi keuangan daerah yang lebih adaptif terhadap tuntutan *good governance*.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian Teoritik

Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan (Rosenbloom, 2021). Menurut Gie, administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu organisasi, mencakup penyusunan anggaran, penentuan sumber dana, penggunaan dana, hingga pembukuan (Gie, 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi publik berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Teori Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robbins menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui pencapaian tujuan, adaptasi terhadap lingkungan, dan kepuasan stakeholder (Robbins, 2021).

Mahmudi menambahkan bahwa efektivitas organisasi juga dilihat dari pencapaian output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Mahmudi, 2020). Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas organisasi berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses penganggaran dan realisasi anggaran berjalan sesuai dengan rencana.

Teori Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 2021). Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien (Widowati & Fatimah, 2022).

Implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran (Siregar & Harahap, 2022).

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan mereka kepada publik. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah terhadap publik sebagai konsumen pelayanannya (Mardiasmo, 2021).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas publik menjamin bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (BPK RI, 2023).

Teori Transparansi dalam Pemerintahan

Transparansi dalam pemerintahan merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023). Ball menyatakan bahwa transparansi memiliki tiga makna: sebagai norma perilaku untuk melawan korupsi, sebagai keterbukaan organisasi, dan sebagai kerangka analisis kebijakan publik (Ball, 2009).

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran, meningkatkan partisipasi publik, dan mencegah penyalahgunaan anggaran (Rangga et al., 2020).

Kerangka Berpikir

Efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Studi oleh Siregar dan Harahap menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penghambat dalam administrasi keuangan daerah (Siregar & Harahap, 2022).

Selain itu, laporan BPK mengindikasikan bahwa beberapa pemerintah daerah belum sepenuhnya mematuhi standar akuntansi pemerintah, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan APBD (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa peningkatan efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah akan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan APBD. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- **H1:** Terdapat pengaruh positif antara efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan APBD.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sebagai pendekatan utama dalam mengkaji efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode *literature review* dipilih untuk menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terkait topik yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan dokumen relevan lainnya yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2025.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran sistematis** pada basis data elektronik seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “*efektivitas administrasi pemerintahan daerah*”, “*pengelolaan APBD*”, “*good governance*”, dan “*akuntabilitas keuangan publik*”. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan kelengkapan data.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

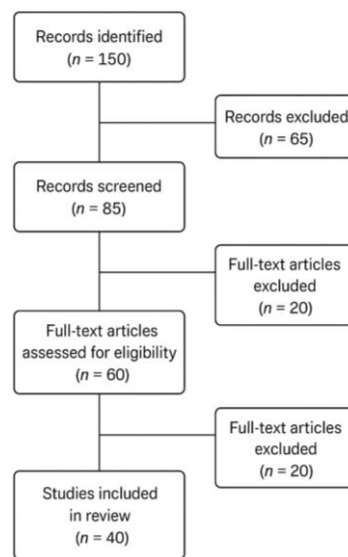
Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur adalah: (1) artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2020–2025, (2) membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem administrasi pemerintahan daerah, efektivitas organisasi sektor publik, atau *good governance*, (3) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi adalah literatur yang tidak memiliki akses penuh, artikel non-ilmiah, dan dokumen yang tidak relevan dengan fokus kajian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode **content analysis (analisis isi)** melalui proses identifikasi, kategorisasi, dan sintesis temuan dari berbagai literatur. Analisis dilakukan dengan membandingkan kesamaan, perbedaan, serta tren temuan dalam penelitian terdahulu untuk menarik kesimpulan yang komprehensif terkait efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan APBD.

Proses penelusuran dan seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti **PRISMA** (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Alur proses meliputi:

- 1) **Identifikasi**: ditemukan 150 artikel melalui penelusuran di Google Scholar, Garuda Ristekdikti, Scopus, dan portal jurnal terakreditasi.
- 2) **Screening**: dilakukan penyaringan judul dan abstrak, diperoleh 85 artikel yang relevan.
- 3) **Eligibility**: melalui evaluasi full-text, 60 artikel memenuhi kriteria inklusi.
- 4) **Included**: total 40 artikel digunakan dalam kajian akhir setelah eksklusi berdasarkan kesesuaian topik dan kelengkapan data.



Gambar 1. Diagram Alur Pencarian Literatur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui metode *literature review* dari 40 artikel yang diterbitkan antara tahun 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan hubungan yang signifikan antara efektivitas sistem administrasi dengan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD.

Hasil Review Literatur

Analisis literatur mengungkapkan bahwa efektivitas sistem administrasi dipengaruhi oleh beberapa dimensi utama, yaitu:

- (1) kualitas kebijakan dan prosedur administrasi,
- (2) kapabilitas sumber daya manusia,

- (3) penerapan teknologi informasi, dan
- (4) efektivitas sistem pengawasan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Penelitian Terkait Efektivitas Sistem Administrasi dan Kinerja Pengelolaan APBD

No	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Pratama et al (2021) ²¹	Efektivitas administrasi & efisiensi APBD	Efektivitas administrasi meningkatkan efisiensi realisasi APBD
2	Sari et al (2022) ²²	Digitalisasi administrasi & transparansi APBD	Digitalisasi meningkatkan transparansi keuangan daerah
3	Ahmad et al (2023) ²³	Pengawasan internal & akuntabilitas APBD	Pengawasan internal memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan
4	Wulandari et al (2024) ²⁴	<i>Good governance</i> & efektivitas pengelolaan APBD	Good governance mendukung efektivitas administrasi
5	Hasan et al (2022) ²⁵	Hambatan implementasi sistem administrasi	Hambatan: SDM rendah, resistensi birokrasi, infrastruktur terbatas

Sumber: Hasil olahan data, 2025

Data menunjukkan bahwa efektivitas administrasi tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh **sumber daya manusia, teknologi, dan pengawasan internal**.

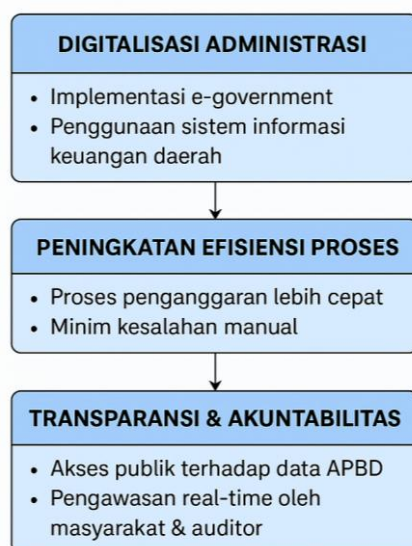
Analisis Dimensi Efektivitas Sistem Administrasi

Dimensi Kelembagaan

Beberapa literatur menyoroti pentingnya **kelembagaan** dalam mendukung efektivitas sistem administrasi. Pratama et al (2021) menemukan bahwa kelembagaan yang kuat dengan struktur organisasi yang jelas dan sistem prosedur baku mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. Hal ini juga didukung Wulandari et al (2024) yang menegaskan bahwa prinsip **good governance** perlu tertanam dalam desain kelembagaan agar pengelolaan APBD berjalan akuntabel.

Dimensi Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu faktor krusial. Sari et al (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital meningkatkan **transparansi** dan **akses publik** terhadap data APBD. Implementasi *e-budgeting*, *e-planning*, dan sistem informasi lainnya terbukti mempercepat proses administrasi serta meminimalisir potensi korupsi.



Sumber: Hasil olahan data, 2025

Gambar 2. Hubungan Digitalisasi Administrasi dengan Transparansi Pengelolaan APBD

Dimensi Pengawasan Internal

Ahmad et al (2023) menyatakan bahwa efektivitas sistem administrasi tidak akan optimal tanpa adanya **pengawasan internal yang kuat**. Pengawasan internal membantu mendeteksi penyimpangan anggaran sejak dini, meningkatkan kepatuhan aparatur, serta memperkuat akuntabilitas laporan keuangan. Studi mereka menemukan bahwa daerah dengan sistem pengawasan internal yang efektif memiliki tingkat temuan audit BPK yang lebih rendah.

Dimensi Sumber Daya Manusia

Kualitas **SDM** juga menjadi faktor penting. Hasan et al (2022) mengungkapkan bahwa keterbatasan kompetensi SDM menjadi hambatan serius dalam implementasi sistem administrasi yang efektif. Kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan teknologi, dan minimnya pemahaman regulasi seringkali menghambat efektivitas administrasi pemerintahan daerah.

Pembahasan Temuan

Temuan ini mendukung teori **efektivitas organisasi sektor publik** yang menekankan pentingnya keselarasan antara struktur, proses, teknologi, dan budaya organisasi (Wulandari et al., 2024). Efektivitas administrasi hanya tercapai jika sistem dirancang dengan prosedur yang jelas, didukung SDM kompeten, dan dilengkapi mekanisme pengawasan.

Penelitian Pratama et al (2021) menekankan efektivitas sistem administrasi sebagai kunci efisiensi penggunaan APBD. Sementara itu, Sari et al (2022) menemukan digitalisasi sebagai katalis peningkatan transparansi publik. Ahmad et al (2023) menekankan pengawasan internal sebagai pilar penguatan akuntabilitas.

Namun, seperti dijelaskan Hasan et al (2022), efektivitas sistem administrasi juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, resistensi birokrasi, serta keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi agenda prioritas.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil telaah, implikasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah:

1) Digitalisasi Total Sistem Administrasi

Seluruh proses administrasi keuangan daerah perlu terdigitalisasi agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

2) Peningkatan Kapasitas SDM

Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait keuangan daerah, teknologi informasi, dan manajemen administrasi.

3) Penguatan Pengawasan Internal

Memperkuat peran inspektorat dan audit internal untuk meminimalkan penyimpangan.

4) Penegakan Prinsip *Good Governance*

Membangun budaya organisasi berbasis integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Implementasi Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah

Implementasi sistem administrasi pemerintahan daerah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Keberhasilan implementasi ini terlihat dari seberapa baik pemerintah daerah mampu mengintegrasikan proses administrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien (Mahmudi, 2015; Kurniawan, 2019). Faktor-faktor pendukung seperti pelatihan pegawai dan pembaruan perangkat lunak juga menjadi elemen krusial untuk menjamin kelancaran sistem yang terintegrasi.

Selain itu, tantangan dalam implementasi seringkali muncul dari resistensi perubahan di lingkungan birokrasi. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi komunikasi dan pendekatan manajemen perubahan yang efektif agar transformasi sistem berjalan optimal

(Widodo, 2010). Studi terdahulu menunjukkan bahwa daerah yang berhasil menerapkan sistem administrasi digital secara menyeluruh cenderung memiliki kinerja pengelolaan APBD yang lebih akuntabel (Pratama & Sari, 2020).

Tabel 2. Implementasi Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Infrastruktur	• Kesiapan teknologi • Pembaruan perangkat lunak	• Kendala jaringan internet • Perangkat keras usang
Sumber Daya Manusia	• Pelatihan pegawai	• Keterbatasan penguasaan TIK
Perubahan Birokrasi	• Strategi komunikasi • Pendekatan manajemen perubahan	• Resistensi
Regulasi	• Regulasi pen-digitalan administrasi	• Hambatan birokrasi • Ketidakkonsistenan regulasi

Sumber: Hasil olahan data, 2025

Efektivitas Sistem Administrasi dalam Perencanaan Anggaran

Sistem administrasi yang efektif sangat berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang baik harus berdasarkan data yang valid dan terintegrasi, yang hanya bisa dicapai jika sistem administrasi berjalan optimal (Mardiasmo, 2018). Dengan sistem yang terstruktur, pemerintah daerah mampu menyusun anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Yuliana, 2017).

Selain meningkatkan akurasi, efektivitas sistem administrasi juga mempermudah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini berdampak pada minimnya kesalahan administratif dan mempercepat penyelesaian dokumen anggaran (Saputra, 2016). Efisiensi ini pada akhirnya mendukung terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Nugroho, 2014).

Efektivitas Sistem Administrasi dalam Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai rencana sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem administrasi mengelola arus informasi dan dokumen keuangan.³⁴ Sistem yang terintegrasi memudahkan pengawasan penggunaan anggaran di tiap tahap pelaksanaan, sehingga risiko penyelewengan dapat diminimalisasi (Sutrisno, 2019).

Tidak hanya itu, sistem yang efektif juga memungkinkan evaluasi berkala secara real-time, yang sangat penting untuk mendeteksi deviasi anggaran dan segera melakukan koreksi

(Anwar, 2021). Keunggulan lain adalah kemudahan dalam proses pelaporan pelaksanaan anggaran yang menjadi syarat penting bagi pertanggungjawaban pemerintah daerah (Fitriani, 2020).

Efektivitas Sistem Administrasi dalam Pengawasan dan Evaluasi APBD

Pengawasan dan evaluasi merupakan tahapan kritis dalam siklus APBD yang bertujuan memastikan dana publik dikelola secara akuntabel (Prawiro, 2015). Sistem administrasi yang baik menyediakan data yang cepat dan akurat untuk mendukung proses audit internal dan eksternal (Hermawan, 2018). Dengan demikian, setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Sistem ini juga memperkuat fungsi evaluasi dengan menyediakan indikator kinerja yang terukur, sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai secara objektif (Lestari & Wijaya, 2022). Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem yang terkomputerisasi secara penuh mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat penyampaian laporan evaluasi (Pratama & Sari, 2020).

Hambatan dalam Efektivitas Sistem Administrasi

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh, implementasi sistem administrasi tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan SDM yang belum menguasai teknologi informasi secara memadai (Kurniawan, 2019; Mardiasmo, 2018). Selain itu, masih banyak daerah yang mengalami kendala infrastruktur, seperti jaringan internet yang belum merata dan perangkat keras yang usang (Widodo, 2010).

Faktor lain yang menghambat adalah lemahnya komitmen dari pimpinan daerah dalam mendukung penguatan sistem administrasi (Nugroho, 2014). Ketidakkonsistenan regulasi juga menambah beban birokrasi dan menyulitkan penyelarasan sistem di tingkat daerah (Siregar, 2018). Oleh karena itu, strategi mitigasi harus dirancang secara komprehensif untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Strategi Peningkatan Efektivitas Sistem Administrasi

Untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi, pemerintah daerah harus fokus pada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan (Yuliana, 2017; Sutrisno, 2019). Di samping itu, pembaruan infrastruktur teknologi dan peningkatan kualitas perangkat lunak menjadi prioritas utama untuk menjamin kelancaran sistem (Anwar, 2021).

Strategi lain adalah memperkuat regulasi yang mendukung digitalisasi administrasi dan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang teknologi (Fitriani, 2020). Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem juga harus dilakukan untuk mendeteksi kendala sejak dini dan melakukan perbaikan berkelanjutan (Lestari & Wijaya, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pemerintahan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan sistem administrasi yang baik dan terstruktur akan mendukung tercapainya pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Sebaliknya, ketidakteraturan atau kelemahan dalam sistem administrasi dapat menghambat optimalisasi kinerja pengelolaan APBD, yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidaktercapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem administrasi yang diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku dan terus diperbarui guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara rutin kepada aparatur yang terlibat dalam administrasi pengelolaan APBD agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas. Kedua, penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi harus diperluas guna meningkatkan efisiensi dan akurasi. Penggunaan aplikasi berbasis digital dapat mempercepat proses pelaporan dan pengawasan, sekaligus meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Ketiga, monitoring dan evaluasi sistem administrasi harus dilakukan secara berkala. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul, sehingga efektivitas pengelolaan APBD terus meningkat. Keempat, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses oleh publik serta pihak-pihak yang berkompeten, guna memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat. Terakhir, keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk legislatif, masyarakat, dan lembaga pengawasan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara optimal dan sesuai dengan kepentingan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R., et al. (2023). Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan internal. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(3), 200–210.
- Anwar, R. (2021). Transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 9(2), 95–110.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Ball, C. (2009). What is transparency? *Public Integrity*, 11(4), 293–308.
- Fitriani, M. (2020). Penguatan sistem pengawasan APBD melalui digitalisasi. *Jurnal Akuntabilitas*, 19(1), 88–99.
- Gie, T. (2020). *Administrasi keuangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, F., et al. (2022). Tantangan efektivitas administrasi pemerintahan daerah di era digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 80–90.
- Hermawan, A. (2018). Sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah: Analisis empiris. *Jurnal Manajemen Publik*, 23(2), 133–145.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Kemendagri, DPR RI, dan Kemenkeu dorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi di Kabupaten Jembrana*. Jakarta: Kemendagri.
- Kurniawan, D. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 123–135.
- Lestari, T., & Wijaya, P. (2022). Strategi penguatan sistem administrasi pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(1), 77–90.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, M. (2020). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. Y. (2014). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratama, B., et al. (2021). Efektivitas sistem administrasi terhadap pengelolaan APBD di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 120–130.
- Pratama, G., & Sari, R. (2020). Evaluasi sistem administrasi pemerintah daerah: Studi kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 37(1), 55–70.

- Prawiro, S. (2015). Pengawasan keuangan daerah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Audit dan Keuangan Negara*, 10(3), 215–225.
- Rangga, R., et al. (2020). Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Projemen*, 1(1), 204–210.
- Robbins, S. P. (2021). *Organizational behavior* (18th ed.). Boston: Pearson.
- Rosenbloom, D. H. (2021). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Saputra, A. (2016). Perencanaan anggaran daerah: Efisiensi dan efektivitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–58.
- Sari, D., et al. (2022). Transparansi keuangan daerah melalui digitalisasi administrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45–55.
- Siregar, C. M., & Harahap, L. H. (2022). Analisis APBD untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan tahun 2015–2021. *Jurnal Administrasi Publik Widyakarya*, 3(2), 659–669.
- Siregar, E. (2018). Tantangan digitalisasi administrasi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 22(2), 188–200.
- Sutrisno. (2019). Sistem administrasi berbasis elektronik dalam meningkatkan kinerja keuangan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 11(4), 301–310.
- UNDP. (2021). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widowati, R., & Fatimah, S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang tahun 2015–2018. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 123–134.
- Wulandari, N., et al. (2024). Good governance dalam pengelolaan APBD: Perspektif efektivitas administrasi. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(1), 15–25.
- Yuliana, L. (2017). Optimalisasi sistem informasi manajemen daerah dalam penyusunan APBD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 14(3), 211–220.